

## ABSTRAK

### **Analisis Hak Cuti Melahirkan Bagi Pegawai Negeri Sipil Perempuan (Studi Kasus Pada Lingkungan Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu)**

Oleh :

**Salsadilla Putri Andini**

Hak-hak perempuan tanpa adanya diskriminasi terhubung dengan konsep *feminisme* yakni perempuan mengalami ketidakadilan berdasarkan jenis kelaminnya namun dalam pelaksanaannya adalah 5 (lima) dari beberapa pegawai perempuan di Bagian Organisasi Setda Kabupaten OKU melebihi batas cuti yang ditentukan oleh pemerintah tanpa aturan sanksi yang jelas. Selain itu, berkonflik dengan aturan pemberian ASI eksklusif yang direkomendasikan oleh PP Nomor 33 Tahun 2012. Rumusan masalah : Bagaimana pelaksanaan cuti melahirkan bagi PNS Perempuan di Lingkungan Kerja Bagian Organisasi Setda Kabupaten OKU?

Teori yang digunakan Analisis Hak Cuti Melahirkan dari Feminisme Liberal dimana perempuan memiliki kesempatan yang sama dan seharusnya tidak terkekang oleh dominasi pria dalam segala bentuknya serta memiliki kesempatan untuk meraih kebebasan yang utuh dan melakukan hal-hal secara bebas.

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, data diperoleh dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan dasar bagi pemberian hak cuti melahirkan. PP Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 memberikan dasar hukum untuk hak-hak PNS, termasuk hak cuti.

Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan peran Feminisme liberal memberikan kesempatan, tidak terkekang, dan kebebasan PNS perempuan untuk menerima haknya. Namun masih terdapat penyalahgunaan kebijakan, sehingga saran yang dapat diberikan yakni PNS yang mengajukan izin cuti melahirkan sebaiknya lebih memperhatikan ketentuan dalam Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 dan Kepala Bagian Organisasi lebih tegas dalam memberikan sanksi untuk batas waktu cuti.

**Kata Kunci:** Cuti Melahirkan, Hak-Hak Perempuan

## **ABSTRACT**

***Analysis of Maternity Leave Rights for Female Civil Servants (Case Study in the Work Environment of the Organizational Section of the Regional Secretariat of Ogan Komering Ulu Regency)***

**By :**

***Salsadilla Putri Andini***

*Women's rights without discrimination are connected to the concept of feminism, namely that women experience injustice based on their gender, but in practice, 5 (five) of the female employees in the Organizational Section of the Regional Secretariat of OKU Regency exceed the leave limit determined by the government without clear sanctions rules. Apart from that, it conflicts with the rules for exclusive breastfeeding recommended by Government Regulation Number 33 of 2012. Problem formulation: How is maternity leave implemented for female civil servants in the work environment of the Organizational Section of the OKU Regency Regional Secretariat?*

*The theory used is Analysis of Maternity Leave Rights from Liberal Feminism where women have equal opportunities and should not be constrained by male domination in all its forms and have the opportunity to achieve complete freedom and do things freely.*

*The type of research used is a descriptive qualitative approach, data is obtained by observation, interviews and documentation. The research results show the basis for granting maternity leave rights. PP Number 11 of 2017 and BKN Regulation Number 24 of 2017 provide the legal basis for the rights of civil servants, including leave rights.*

*The conclusion of the research results shows that the role of liberal feminism provides opportunities, unfettered, and freedom for female civil servants to receive their rights. However, there is still abuse of the policy, so the advice that can be given is that civil servants who apply for maternity leave permission should pay more attention to the provisions in BKN Regulation Number 24 of 2017 and the Head of the Organizational Section be more firm in providing sanctions for the time limit for leave.*

**Keywords:** *Maternity Leave, Women's Rights*